

BAB II

KRISIS KEMANUSIAAN DI RAKHINE TAHUN 2012 – 2017

Sebagai salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara, Myanmar dikenal sebagai negara multikultural dengan ragam etnis dan agama. Tercatat bahwa Myanmar memiliki 55 juta populasi dengan 135 etnis pribumi yang terbagi dalam 7 etnis besar yang diakui oleh pemerintah Myanmar (Farzana, 2017, p. 15). Sebanyak 68% penduduk Myanmar didominasi oleh etnis Burma, sedangkan 32% lainnya terbagi dalam beberapa etnis minoritas seperti Shan, Karen, Rakhine, Chinese, Indian, dan Mon. Myanmar yang didominasi oleh etnis Burma menganut agama Budha sebanyak 87,9% dari total populasi yang ada, sedangkan sisanya menganut agama Kristen, Muslim, Animisme, Hindu dan Atheis (CIA, 2014). Eratnya keterkaitan antara kelompok etnis dengan agama menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi struktur masyarakat Myanmar yang rentan terhadap terjadinya konflik (Ganesan, 2007). Warisan sejarah Myanmar yang menjadikan etnis minoritas sebagai bagian yang termarginalisasi oleh kebijakan negara yang lebih berpihak kepada etnis mayoritas serta diwarnai dengan aksi kekerasan dianggap sebagai penyebab utama konflik etnis yang berkepanjangan di Rakhine hingga saat ini (Burma Link, 2014)

2.1 Kondisi Negara Bagian Rakhine

Negara Bagian Rakhine yang beribukota Sittwe ini, terletak dalam kondisi geografis yang strategis, karena dijadikan sebagai kawasan jalur perdagangan yang menghubungkan antara China dengan beberapa negara dagang lainnya seperti India dan Bangladesh (Heugas,

2017). Selain itu, Rakhine juga kaya akan bahan bakar fosil serta sumber daya mineral seperti minyak, gas, emas, dan kayu yang kemudian memunculkan adanya motif bisnis minyak dan gas, pelabuhan internasional hingga zona industri di daerah tersebut.

Sebanyak 3.2 juta penduduk negara bagian Rakhine yang terbagi menjadi dua etnis yaitu Rakhine atau disebut juga Arakanese sebagai penduduk asli yang mayoritas dengan jumlah 2,1 jiwa, sedangkan penduduk lainnya beragama muslim yang dikenal dengan Rohingya sebesar 1,1 jiwa (Penny Green, 2015, p. 27). Rohingya yang tinggal di desa membentuk sebuah kelompok yang sebagian besar menetap di Maungdaw dan Buthidaung di bagian Rakhine Utara. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Rakhine berbanding terbalik dengan kondisi kehidupan masyarakat Rakhine yang sebagian besar mengalami tingkat kemiskinan yang parah. Angka kemiskinan wilayah ini sebesar 78 persen yang jumlahnya dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan kemiskinan di Myanmar yang hanya sekitar 37.54 persen (World Bank, 2014, p. 15). Lemahnya sistem pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadikan Rakhine dikenal sebagai daerah terbelakang dibandingkan dengan wilayah lainnya. Bukti lainnya yaitu kurangnya akses pendidikan, kesehatan hingga sulitnya mencari mata pencaharian sehingga menempatkan Rakhine sebagai salah satu daerah yang menduduki posisi kedua termiskin di Myanmar (Advisory Commission on Rakhine State, 2017).

Kemiskinan bukan menjadi satu-satunya faktor penderitaan di Rakhine, meluasnya konflik hingga kerusuhan antar komunal seperti antara orang-orang Rakhine dengan pemerintah pusat dan adanya ketegangan serta kekerasan yang terjadi antara masyarakat

Rakhine dan orang-orang Muslim menjadikan wilayah ini krisis Hak Asasi Manusia dan krisis keamanan. **Krisis Hak Asasi Manusia** ditandai dengan lebih dari setengah penduduk Rakhine menderita kekerasan, pelecehan dan diskriminasi tanpa henti yang membuat komunitas Muslim sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi terutama terhadap etnis minoritas Rohingya. **Krisis Keamanan** di Rakhine ditandai dengan berbagai peristiwa seperti, peristiwa tahun 2012 kerusuhan masyarakat Rakhine yang beragama Budha dengan Rohingya (Advisory Commission on Rakhine State, 2017, p. 10). Konflik kembali terjadi di tahun 2016 akibat adanya serangan kelompok ARSA menyebabkan para pihak militer melakukan sebuah operasi pembalasan yang mengakibatkan ribuan Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Pihak militer yang seharusnya memberikan perlindungan dan mempertahankan wilayah Rakhine dari serangan serta membawa perdamaian di Rakhine justru pihak militer ikut terlibat dalam aksi serangan dan kekerasan terhadap Rohingya (Human Right Watch , 2012).

2.2 Kekerasan Rohingya Di Rakhine

Rohingya merupakan salah satu etnis minoritas muslim yang menetap di Maungdaw dan Buthidaung Rakhine Utara yang merupakan wilayah perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh. Rohingya dianggap sebagai *stateless* atau tanpa status kewarganegaraan kerap menjadi korban dari kebencian etnis oleh masyarakat Rakhine yang beragama Budha dan kerap mengalami diskriminasi dari berbagai otoritas Myanmar (Brooten, 2015, p. 137). Pemahaman sejarah yang berbeda mengenai keberadaan Rohingya di Rakhine dijadikan

sebagai alasan utama kebencian pemerintah Myanmar dan masyarakat Rakhine yang beragama Budha terhadap Rohingya.

2.2.1 Perdebatan Sejarah Lahir dan Status Kewarganegaraan Rohingya

Kemunculan istilah Rohingya dibuktikan dengan laporan seorang dokter dari Inggris bernama Francis Buchanan pada tahun 1799 yang telah menetap dan menghabiskan waktunya di Rakhine selama 15 tahun. Hasil dokumentasi Buchanan menyatakan bahwa terdapat anggota kelompok etnis Muslim yang telah lama menetap di Arakan atau Rakhine yang kemudian menyebut diri mereka “Rooinga” atau penduduk asli Arakan. Berdasarkan laporan ini kemudian menjadi asal usul istilah penggunaan kata Rohingya sebagai etnis yang telah ada di Arakan selama berabad-abad bahkan sebelum tahun 1823 ketika Inggris menghapus status kewarganegaraan Rohingya (Polling, 2014).

Dalam catatan sejarah Myanmar menyatakan bahwa ketika terjadi perang pertama antara Inggris – Burma yang berhasil dimenangkan oleh Inggris di tahun 1824-1826. Kemenangan Inggris membuat sebuah kebijakan untuk memperluas Rakhine dengan mencari sebuah tenaga kerja atau buruh. Sebagian buruh yang datang pada saat itu merupakan orang-orang muslim yang berasal dari Bengali. Kebutuhan buruh yang tinggi inilah yang menjadikan jumlah komunitas muslim di Rakhine meningkat pesat pada tahun 1880 hingga 1930 an. Keyakinan yang teguh bahwa Rohingya bukan merupakan penduduk asli Rakhine, hingga detik ini pemerintah Myanmar tidak mengakui istilah Rohingya dan tetap berkeyakinan

bahwa Rohingya merupakan *Illegal migrant* yang berasal dari Bangladesh yang dikenal dengan suku Bengali.

Pada awal kemerdekaan Burma pada tahun 1948, Rohingya masih diakui sebagai bagian dari warga negaranya dibuktikan dengan diberikannya sebuah kartu identitas yaitu kartu penduduk Burma. Namun kemudian, ditahun 1962 keadaan Rohingya diperburuk ketika Burma dikuasai oleh Junta Militer. Dalam pandangan Junta Militer secara konsisten membantah bahwa Rohingya sebenarnya bukan merupakan kelompok etnis pribumi. Dalam sebuah pernyataan 26 Februari 1992, Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan bahwa:

In actual fact, although there are [135] national races living in Myanmar today, the so-called Rohingya people is not one of them. Historically, there has never been a 'Rohingya' race in Myanmar. The very name Rohingya is a creation of a group of insurgents in the Rakhine State. Since the First Anglo-Myanmar War in 1824, people of Muslim Faith from the adjacent country illegally entered Myanmar Ngain-Ngan, particularly Rakhine State. Being illegal immigrants they do not hold immigration papers like other nationals of the country.

Pandangan ini dijadikan sebagai penyebab utama kebijakan Junta Militer melucuti hak-hak sipil, politik hingga hak ekonomi Rohingya (Lee, 2014, p. 325). Sebagai buktinya pada tahun 1974 ketika diadakan pemilihan umum, Rohingya tidak diizinkan untuk memberikan hak suaranya karena tidak memiliki identitas resmi.

Status kewarganegaraan Rohingya semakin di pertanyakan ketika Ne Win memberlakukan *Burma Citizenship Law* atau Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982. Pengaturan Undang-Undang tersebut secara khusus dibentuk sebagai pengecualian Rohingya sebagai bagian dari 135 etnis di Myanmar yang secara otomatis menciptakan

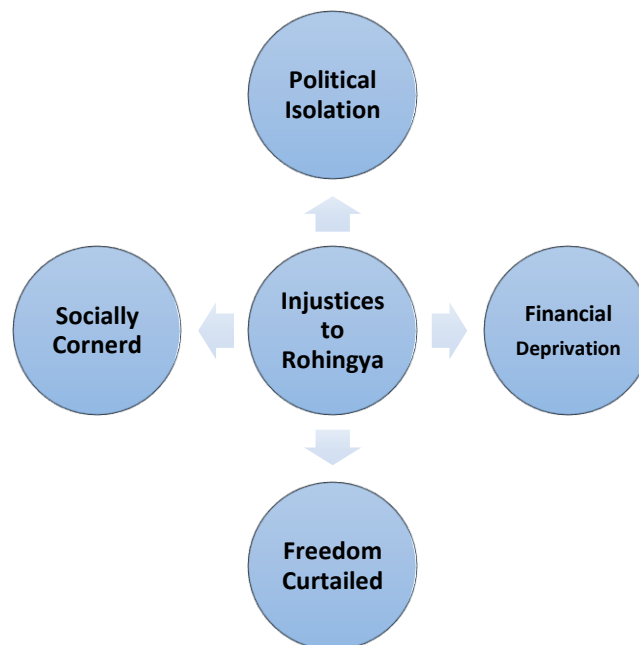
Rohingya berstatus *stateless* atau sebagai masyarakat tanpa kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, orang yang disebut sebagai Warga negara adalah orang-orang yang termasuk dari salah satu etnis nasional Myanmar seperti Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine atau Shan termasuk nenek moyangnya yang telah menetap di Myanmar sebelum 1823 sebagai awal pendudukan Inggris negara bagian Arakan. Selain itu, meskipun Rohingya telah membuktikan dan mampu memenuhi syarat kewarganegaraan namun keputusan untuk diberikan kewarganegaraan atau tidak berdasarkan keputusan Menteri. Terbukti bahwa pengaturan perundangan dibuat secara sistematis untuk menjadikan Rohingya sebagai kelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kebijakan ini dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan bahwa negara yang ditempati Rohingya tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan (Farzana, 2017, p. 52).

Status kewarganegaraan Rohingya yang tidak diakui membuatnya kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi baik secara politik maupun ekonomi seperti pembatasan atas kebebasan bergerak, pembatasan pernikahan, pembatasan akses untuk bepergian ke pasar. Selain itu, pemerintah Myanmar melakukan penolakan akses pendidikan, kesempatan kerja hingga penolakan akses kesehatan yang menyebabkan para pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp –kamp terkhusus para bayi dan anak-anak menderita malnutrisi yang berat, angka kematian bayi dan tingkat kematian akibat berbagai macam penyakit semakin tinggi (Lee, 2014, p. 323)

Sedangkan diskriminasi secara politik terlihat ketika adanya penolakan penggunaan istilah Rohingya dan memperbolehkan menyebutnya sebagai *illegal migrant*, pengecualian

dari sensus penduduk tahun 2014, serta melarang Rohingya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2015 (Brooten, 2015, p. 136). Selain perlakuan diskriminasi, Rohingya juga mendapatkan kekerasan langsung dari pihak militer Myanmar seperti pembunuhan, penyiksaan dan penganiayaan selama bertahun-tahun, pemerkosaan, penahanan, relokasi paksa, penghancuran rumah dan desa, penyitaan tanah, kerja paksa dan pelanggaran HAM lainnya.

Diagram 2.1.1 Dimensi Ketidakadilan terhadap Rohingya



Source: Rohingya Crisis In Myanmar: Seeking Justice For the “Stateless” (Ullah A. A., 2016)

Berbagai tindakan diskriminasi dan kekerasan merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang telah dirancang secara sistematis dan terorganisir oleh pemerintah Myanmar, militer Myanmar hingga penduduk Rakhine untuk menghapus dan mengusir Rohingya keluar

dari Myanmar (Penny Green, 2015, p. 39). Dengan ukuran apa pun, sejarah perampasan hak Rohingya mulai dari segi politik, ekonomi bahkan sosial sama saja dengan ketidakadilan. Sebagian besar pengungsi di dunia mungkin telah kehilangan atau meninggalkan rumah miliknya, tetapi belum ada yang sampai menanggalkan kewarganegaraannya (Ullah A. A., 2016, p. 292). Rohingya adalah orang-orang tanpa kewarganegaraan juga kerap menuai aksi kekerasan secara sistematis dan pelanggaran HAM yang meluas dari pemerintah Myanmar.

2.2.2 Konflik Komunal antar masyarakat Rakhine dan Rohingya tahun 2012

Ketegangan antara Rohingya dan masyarakat Rakhine pada tahun 2012 telah memunculkan kerusuhan di tiga kota yang berbeda di Rakhine yaitu Sittwe, Maungdaw dan Buthidaung sebagai daerah yang didominasi oleh masyarakat Rohingya. Kejadian yang berawal ketika seorang perempuan yang bernama Ma Thida Htwe yang berasal dari perkampungan rakhine dan beragama Budha telah di perkosa, di rampok dan dibunuh oleh 3 orang laki-laki Rohingya di kota Yanbe. Perbuatan tersebut menimbulkan kemarahan bagi umat Budha yang dibuktikan dengan beberapa hari setelahnya sekelompok besar dari orang-orang Rakhine membunuh sepuluh orang Muslim yang bepergian melalui bis terdekat di kota secara brutal (Kipgen, 2013, p. 301).

Peristiwa pada tahun 2012 disinyalir sebagai skala besar kekerasan terhadap etnis muslim rohingya. Dalam catatan *Human Right Watch* menyatakan bahwa pemerintah Myanmar, masyarakat Rakhine dan militer Myanmar telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengarah ke aksi genosida. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan

adanya kampanye pembersihan etnis muslim Rohingya di Rakhine (Human Right Watch, 2013). Banyaknya gerakan anti Muslim yang dibentuk oleh masyarakat beragama Budha seperti 8888, 969 dan 786 dijadikan sebagai gerakan yang mendukung dan memicu meningkatnya peristiwa pemusnahan Rohingya di Rakhine.

Para militer Myanmar yang beroperasi di Arakan yang seharusnya mencegah kekerasan yang terjadi, bahkan menjadi tokoh yang juga ikut terlibat dan berpartisipasi didalamnya. Pihak militer seperti polisi lokal, polisi anti huru hara Lon Thein (*Lon Thein riot police*), satuan kontrol perbatasan atau Nasaka bahkan Angkatan Darat dan angkatan laut terlibat langsung dalam melakukan serangan berupa terror serta relokasi paksa terhadap Rohingya. Kondisi diperparah ketika pihak militer ikut membantu melakukan pembunuhan dan melucuti senjata Rohingya, bahkan pihak militer telah memesan penggali untuk mengubur korban pengungsi dikuburan massal (Kingston, 2015, p. 6).

Pihak militer juga menghalangi serta menolak akses bantuan kemanusiaan untuk ribuan pengungsi Rohingya. Para pengungsi Rohingya di kamp pengungsian membutuhkan bantuan, terutama bantuan makanan dan kesehatan. Namun di tahun 2013 pemerintah Myanmar dan militer Myanmar dengan sengaja memblokir akses bantuan kemanusiaan ke daerah konflik dari organisasi Internasional seperti UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) dan Enam belas organisasi non-pemerintah lainnya termasuk Oxfam dan *Save the Children* (Holmes, 2017). Hal yang sama juga terjadi di tahun 2014 ketika pemerintah Myanmar dan para militer Myanmar mengeluarkan organisasi non-pemerintah untuk bantuan kemanusiaan yaitu *Medecins Sans Frontieres* serta mengusir lebih

dari 300 pekerja kemanusiaan pelayanan kesehatan untuk ratusan ribu para pengungsi Rohingya (Brooten, 2015, p. 135)

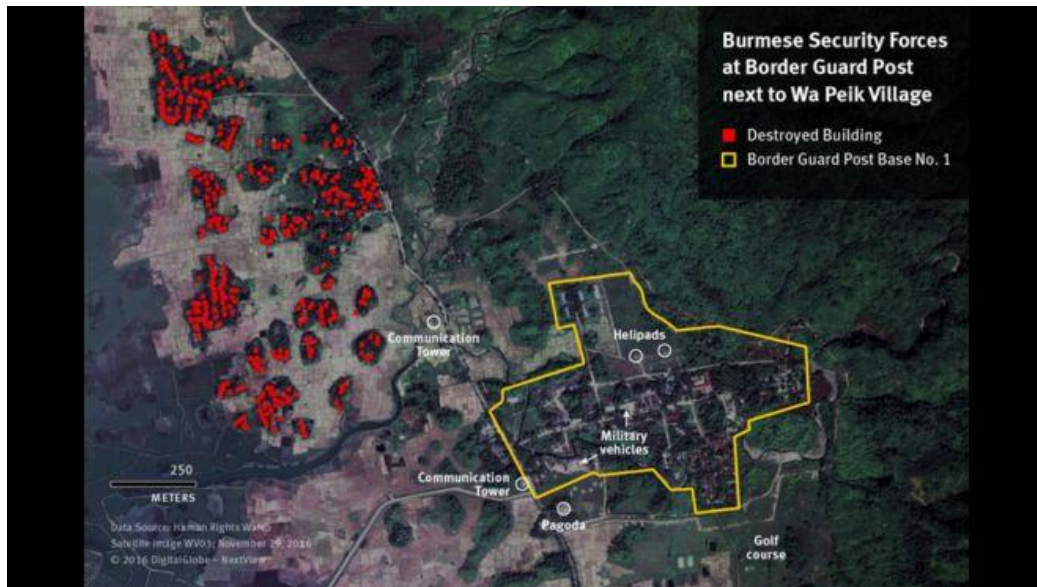
2.2.3 Peristiwa “*cleareance operation*” Oktober 2016 dan Agustus 2017

Pasca krisis yang terjadi antara masyarakat Rakhine dan Rohingya pada tahun 2012 lalu, ketegangan terhadap konflik Rohingya terus menjadi sorotan dunia Internasional. Kerusuhan kembali meningkat sejak Oktober 2016 membuat hubungan antara Rohingya dan militer Myanmar kembali memanas ketika militan dari *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) menyerang tiga pos polisi di perbatasan Rakhine tepatnya di Kota Maungdaw yang menewaskan sebanyak sembilan petugas kepolisian. ARSA atau yang dikenal dengan *Harakat Al-Yaqin* merupakan kelompok yang dibentuk oleh orang-orang Rohingya.

Menanggapi serangan yang dilakukan oleh ARSA, militer Myanmar menganggap ARSA merupakan kelompok teroris yang mampu mengancam kesatuan, stabilitas dan kedaulatan Myanmar (Selth, 2017). Pemikiran inilah yang menjadi landasan kuat militer Myanmar melancarkan sebuah aksi yang dikenal dengan “*cleareance operation*” atau operasi pembalasan keamanan skala besar di Rakhine. Selama berlangsungnya operasi pembalasan, pihak militer melakukan serangan secara luas dan sistematis yang mengarah ke aksi genosida. Pihak militer Myanmar dengan sengaja menargetkan dan membunuh warga sipil, menembak warga secara acak, melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap pria Rohingya, memperkosa para perempuan dan anak perempuan Rohingya, serta menghancurkan dan

membakar rumah serta harta benda yang sebagian besar didominasi oleh Rohingya (Amnesty International, 2016, p. 3).

Gambar 2.2.3 Cuplikan Rekaman Satelite Pembakaran di Rakhine



Source: Burmese army linked to Rohingya village arson, rights group says (BBC, 2016)

Berdasarkan survei *Amnesty Internasional* menggambarkan serangan brutal dalam operasi pembalasan yang dilakukan militer Myanmar dengan mengerahkan dua helikopter tempur yang bertujuan untuk menembaki para penduduk Rakhine secara brutal (Amnesty International, 2016, p. 7). Keadaan Rohingya semakin diperparah ketika, para militer Myanmar membakar dengan lebih dari 1.500 rumah dan juga bangunan yang didominasi oleh Rohingya. Senjata yang digunakan pihak militer yaitu berupa *rocket-propelled* granat peluncur (RPG) yang fungsinya untuk menghancurkan rumah-rumah (Djamin, 2016).

Setahun setelah terjadinya peristiwa pembalasan militer Myanmar pada Oktober 2016, peristiwa yang sama terjadi pada 25 Agustus 2017. Kelompok ARSA kembali menyerang 30 pos kepolisian dan sebuah pangkalan militer di tiga kota utama Rakhine yaitu Maungdaw, Buthidaung, dan Rathedaung. Penyerangan yang dilakukan kini lebih besar dibandingkan Oktober 2016, karena menewaskan puluhan polisi dan tentara. Setelah kelompok ARSA melakukan serangan, pihak militer Myanmar kembali melakukan aksi pembalasan brutal seperti yang dilakukan pada Oktober 2016 dengan menargetkan warga sipil Rohingya. Sejak itu, lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh, mewakili sekitar 80 persen dari total populasi Rohingya di Rakhine. Sedangkan Sekitar 200.000 orang warga Rohingya tinggal di permukiman pengungsi di distrik Cox's Bazar, Bangladesh, setelah melarikan diri dari kekerasan sebelumnya. Diketahui bahwa, pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh diperkirakan memiliki total populasi sekitar 1,1 juta orang atau sudah seluruh masyarakat Rohingya keluar dari Rakhine.

2.3 Upaya dan Respon Pemerintah Myanmar Mengenai Konflik tahun 2012 dan 2017

Situasi Rakhine bagaikan negara bagian yang rentan terhadap konflik dengan berlandaskan pada kebencian terhadap Rohingya. Sikap diskriminasi, kejahatan hingga kekerasan terus bergulir yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Rakhine, pihak militer hingga pemerintah Myanmar. Sikap apatis pemerintah Myanmar menjadi tonggak semakin memanasnya krisis kemanusiaan yang terjadi bagi Rohingya. Sebagai negara yang saat ini menuju demokrasi, Myanmar dihadapi banyak tantangan terutama konflik antar komunal yang tiada akhir.

2.3.1 Respon dan Upaya Presiden Thein Sein

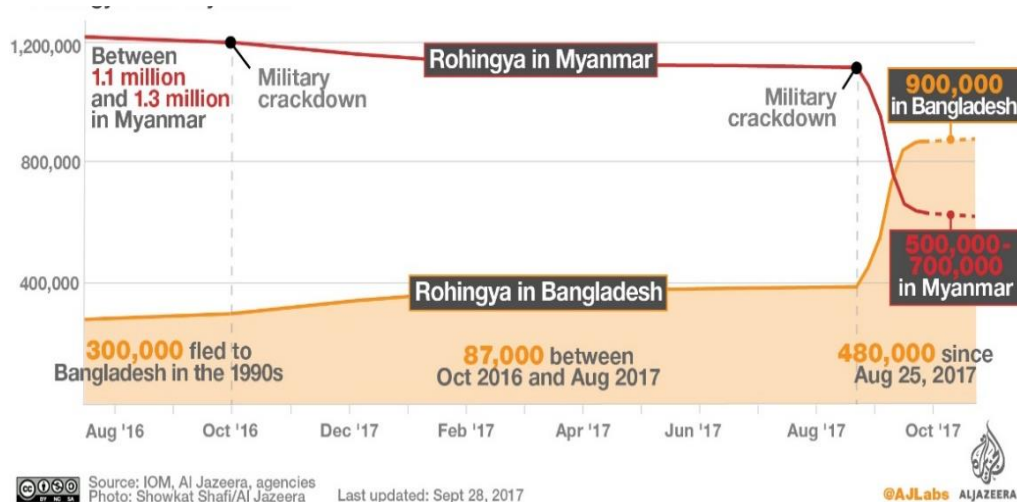
Peristiwa tahun 2012 menjadi sebuah tantangan baru yang dihadapi Thein Sein sebagai presiden pertama yang dipilih melalui pemilihan umum pada tahun 2010. Terpilihnya Thein sein sebagai presiden pertama melalui sistem demokrasi menjadikan sebuah babak baru bagi perpolitikan Myanmar serta sebuah harapan baru bagi Rohingya dapat memperoleh penghidupan yang layak dibandingkan pada pemerintahan sebelumnya. Harapan justru berbanding terbalik ketika pada masa pemerintahan Thein Sein diskriminasi dan pelanggaran HAM secara sistematis terjadi pada tahun 2012. Menanggapi peristiwa ini Thein Sein tidak melakukan upaya yang signifikan dalam meminimalisir konflik yang terjadi antar Rakhine dan Rohingya. Hal yang mengejutkan ketika Thein Sein berkomentar disebuah media massa bahwa :

"We will take responsibility for our ethnic people but it is impossible to accept the illegally entered Rohingyas, who are not our ethnicity. The former general said the "only solution" was to send the Rohingyas to refugee camps run by UNHCR. Or We will send them away if any third country would accept them. This is what we are thinking is the solution to the issue." (Al-Jazeera, 2012)

Solusi terbaik yang ditawarkan Thein Sein dengan mengirimkan Rohingya sebagai orang yang tanpa status kewarganegaraan ke negara-negara ketiga ataupun menempatkan Rohingya di Kamp-kamp yang telah disediakan dan dikelola oleh UNHCR mendapatkan dukungan besar dari masyarakat Myanmar terutama yang beragama Budha. Pemerintah tidak mengambil tindakan jangka panjang, melainkan secara tidak langsung Thein Sein mencoba mendorong dan mengusir Rohingya dari Myanmar. Hal inilah yang menjadi bukti sejak

Thein Sein menjadi presiden dan kebijakan yang dicanangkan menyebabkan terjadinya krisis perahu ditahun 2012 karena sebanyak dua puluh persen dari populasi Rohingya sedikitnya 140.000 jiwa melarikan diri dari Rakhine untuk mencari keselamatan ke negara tetangga seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan tujuan utamanya ialah Bangladesh dengan menggunakan perahu (Burma Campaign UK, 2015 , p. 2)

Gambar 2.2.3 Perpindahan Rohingya dari Rakhine ke Bangladesh



Source: How Myanmar expelled the majority of its Rohingya (Asrar, 2017)

Solusi yang diberikan Thein Sein ternyata menimbulkan kritik dan kecaman internasional, karena Thein Sein dianggap tidak bertanggungjawab dan hanya menimbulkan masalah baru dinegara lain. Menanggapi kemarahan komunitas internasional saat itu, Thein sein kemudian membuat sebuah upaya dalam mencegah kekerasan, dengan membentuk sebuah komisi yang diberi nama panitia 16 - anggota pada tanggal 6 Juni untuk menyelidiki konflik yang terjadi melalui sebuah Komite yang dipimpin oleh Wakil Menteri dalam negeri.

Pada 11 Juni, Presiden Myanmar Thein Sein berkomitmen akan adanya sebuah aturan hukum untuk menghimbau masyarakat agar bekerja sama dengan Komite untuk membawa perdamaian ke Rakhine (Embassy of The Republic of The Union of Myanmar , 2013).

Upaya lain dalam memahami penyebab kekerasan, pemerintah dituntut untuk menyediakan kebijakan yang transparan. Thein sein kembali membentuk sebuah komisi penyelidikan yang terdiri dari 27 anggota pada 17 Agustus 2012. Perwakilan komisi ini lebih inklusif dibandingkan komite yang terdiri dari 16 anggota. Komisi 27 anggota ini beranggotakan pemimpin dari beberapa organisasi keagamaan termasuk para kaum Muslim, intelektual, politisi dan pejabat pemerintah. Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon mengeluarkan pernyataan untuk mendukung komisi baru tersebut.

2.3.2 Respon dan Upaya Presiden Htin Kyaw dan Aung San Suu Kyi

Turunnya Thein sein dari presiden digantikan oleh Htin Kyaw sebagai presiden terpilih dari kalangan sipil pada tahun 2015. Terpilihnya Htin Kyaw menjadi harapan besar Rohingya untuk terlepas dari penderitaan dipercaya mampu mengatasi bahkan menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine. Terlebih Htin Kyaw mempunyai kedekatan dengan Aung San Suu Kyi sebagai ikon penggerak demokrasi dan hak asasi manusia yang dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991 karena perjuangannya selama pemberontakan anti pemerintah tahun 1998. Posisi Aung san suu kyi sebagai pemimpin partai oposisi Myanmar yaitu *National League for Democracy* (NLD) serta menjabat sebagai penasihat negara menjadikannya sebagai pemimpin de facto pemerintahan sipil Myanmar

yang kemudian menjadikan sebuah harapan masyarakat internasional terjaminnya HAM di Myanmar (Lee, 2014, p. 322). Namun, ketika dipertanyakan mengenai situasi Rohingya di Rakhine Suu Kyii terlihat diam tanpa mengambil sebuah tindakan dalam menjamin dan melindungi HAM Rohingya. Keheningan ini yang kemudian menyebabkan kegelisahan yang signifikan dalam masyarakat internasional, yang sebelumnya sangat mendukung aspirasi politik Suu Kyi.

Setahun setelah terpilihnya Htin Kyaw sebagai presiden, peristiwa mengerikan kembali terjadi terhadap Rohingya yang bertepatan pada Oktober 2016. Aksi serangan militer Myanmar meningkatkan tekanan dan kritikan dari berbagai pihak internasional seperti Sekretaris-Jenderal PBB, *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *United Nations Population Fund* (UNFPA) dan *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) untuk segera mengatasi situasi di Rakhine (Amnesty International , 2016, p. 36) .

Atas desakan yang didapati dari pihak Internasional, Htin Kyaw sebagai presiden Myanmar akhirnya membuat beberapa langkah untuk meminimalisir situasi di Rakhine. Komisi bentukan Htin Kyaw dinamakan dengan Komisi 13 – anggota yang dipimpin oleh wakil presiden Myint Swe yang merupakan seorang mantan Jenderal berpangkat tinggi di tentara Myanmar dan dianggotai oleh kepala kepolisian yang saat ini menjabat dan sejumlah mantan pejabat pemerintahan (Ullah, 2017)

Hasil investigasi yang dilakukan komisi 13 dilaporkan pada 3 Desember 2017 menyatakan tidak adanya bukti nyata dari tuduhan yang ditujukan kepada pihak militer Myanmar, sehingga komisi ini secara tegas menolak tuntutan adanya aksi pelecehan, pelanggaran, penganiayaan secara agama serta genosida yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar. Namun kemudian, komisi penasihat khusus PBB pencegahan genosida mencatat bahwa komisi 13 bentukan Htin Kyaw bukanlah merupakan sebuah pilihan yang dapat dipercaya kebenarannya dalam menyelidiki pelanggaran terhadap Rohingya. Mengingat keanggotaan komisi 13 yang sebagian besar di dominasi oleh pasukan militer Myanmar, sehingga dianggap penyelidikan yang dilaksanakan tidak kredibel karena akan adanya keberpihakan diantara para anggota dalam menyelidiki pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Rohingya.

Komisi lainnya yang dibentuk pada 9 Februari dan 11 Februari 2017 oleh Angkatan Darat dan Kementerian dalam negeri juga di pimpin dan dikendalikan oleh Militer. Komisi yang juga dianggotakan oleh aparat militer dan polisi ini mendapat stigma negatif dari internasional karena akan menimbulkan ketidakmandirian dan juga keberpihakan dalam menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Parlemen negara bagian Rakhine ikut membentuk sebuah komisi yang dikenal dengan komisi 11 – anggota yang anggota utamanya terdiri dari etnis rakhine dari *Arakan Nasional Party* (ANP). Tujuannya untuk menyelidiki serangan pada 9 Oktober 2016 terhadap tiga pos polisi diperbatasan Rakhine. Dalam penyelidikan ini ketua komisi *Arakan Nasional Party* yaitu MP Aung dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa pemerkosaan yang

dilakukan oleh pihak militer Myanmar mustahil terjadi, mengingat para perempuan Rohingya sangat kotor dan tidak menarik, sehingga tidak ada kemungkinan laki-laki Budha Rakhine ataupun militer tertarik dengan perempuan Rohingya (Ullah A. , 2017).

Pemimpin de-facto Myanmar yaitu Aung san suu kyi membentuk sebuah komisi penasehat negara bagian Rakhine pada 24 agustus 2016 yang diketuai oleh mantan Sekretaris Umum PBB Kofi Annan sebagai ketua komisi. Komisi Penasihat negara bagian Rakhine berfungsi sebagai suatu badan penasehat pemerintah dengan memberikan sebuah mandat untuk membuat rekomendasi mengenai bantuan kemanusiaan serta mendorong rekonsiliasi antara kelompok etnis di Rakhine. Sementara komisi dapat memainkan peran yang berguna dalam menasihati pemerintah tentang bagaimana langkah untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan di Rakhine dalam jangka panjang. Namun, komisi yang dibentuk Suu kyi tidak mendapatkan kemajuan yang signifikan karena mandat dari Kofi Annan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah Myanmar sangat terbatas sehingga proses penyelesaian masalah terkesan berlarut-larut di Rakhine.